LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/ 350 /K/411.013/2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

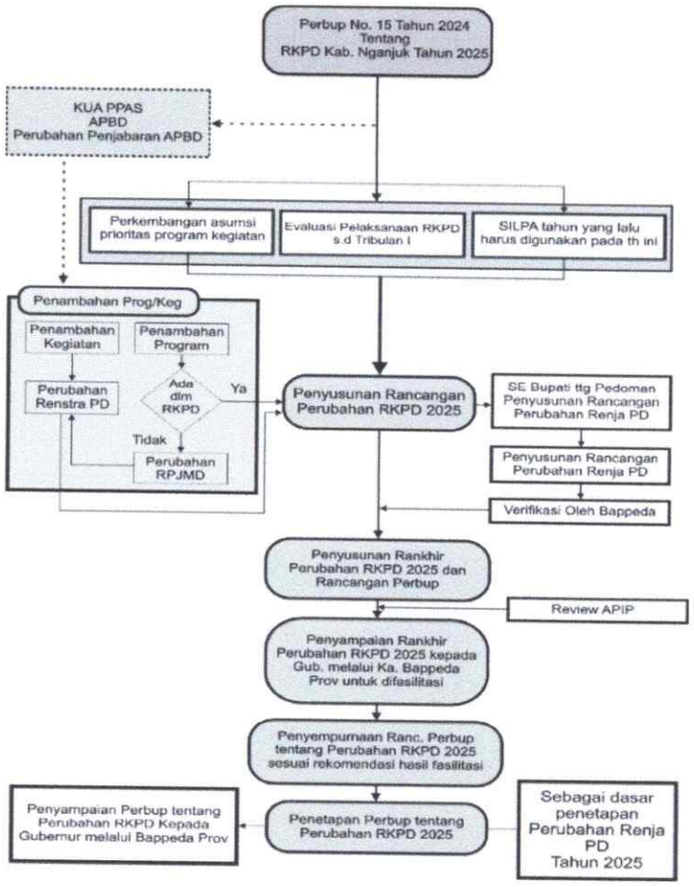
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut

Gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I tahun berkenaan pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
b. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2025;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025; dan
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Pelaksanaan evaluasi perubahan Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025, serta pencapaian RPJPD Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
					Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 %	70,20	80,50	75,65	93,98%	76%	0	0%
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	14 dokumen	4 laporan	14 laporan	14 laporan	100%	14 dokumen	4 dokumen	28,57%
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	4 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	20 laporan	1 laporan	5%
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkatdaerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	-	-	-	-	6 laporan	3 laporan	50%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	38 dokumen	20 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	100%	48 dokumen	1 dokumen	2,083%
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	13 orang/bulan	18 orang/bulan	14 orang/bulan	100%	168 orang	42 orang	25%
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 laporan	-	20 laporan	1 laporan	5%	4 laporan	1 laporan	25%
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Ke pegawaian Perangkat Daerah yang disusun	18 paket	-	1 dokumen	0	0%	-	-	-
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	18 paket	-	-	-	-	-	-	-
2	07	01	2.05	0021	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	7 paket	-	-	-	-	-	-	-
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan	1 paket	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	1 dokumen	14,29%
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 dokumen	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	12 dokumen	3 dokumen	25%
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	4 laporan	1 laporan	25%
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	12 laporan	3 laporan	25%
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	192 unit	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 laporan	100%
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diadakan	-	-	97 unit	97 unit	100%	74 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	150 unit	-	-	-	-	-	-	-
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 unit	-	150 unit	150 unit	100%	36 unit	0 unit	0%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	-	35 unit	35 unit	100%	28 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	12 unit	12 unit	100%	98 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	1 dokumen	6 laporan	14 laporan	14 laporan	100%	14 laporan	3 laporan	21,43%
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	12 laporan	3 laporan	25%
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	12 laporan	3 laporan	25%
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	3 laporan	25%
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara.	1 unit	9 unit	28 unit	28 unit	100%	24 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	1 unit	10 unit	10 unit	100%	5 unit	0 unit	0%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	-	-	-	-	20 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	21 unit	5 unit	5 unit	100%	17 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	-	5 unit	5 unit	100%	3 unit	0 unit	0%
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 unit	5 unit	5 unit	100%	17 unit	0 unit	0%
2	*07*				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		60%							
2	*07*	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Prosentase akurasi, proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	4%	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
2	*07*	02	2.01		Penyusunan Rencana Kerja (RTK)	Persentase perusahaan yang menyusun RTK	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
2	*07*	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK) yang disusun	100%	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
2	*07*	03			Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster	60%	100%	100%	100%	100%	100%	28,57%	28,57%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi	180 orang	66,04%	71%	60,20%	84,79%	72%	0,7%	0,010%
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	40 Lembaga	1.964 orang	180 orang	490 orang	272%	140 orang	40 orang	28,57%
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas intruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktifitas	80%	-	-	-	-	-	-	-
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan sarana pelatihan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	30 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK swasta yang dibina	5%	-	80%	50%	62,50%	82%	44,56%	54,34%
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	10 perusahaan	-	35 lembaga	50 lembaga	142,86%	45 lembaga	45 lembaga	100%
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas	100%	-	7%	30%	482,57%	11%	0%	0%
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas	3 perizinan	-	15 perusahaan	50 perusahaan	333%	45 lembaga	0 lembahga	0%
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	1%	-	-	-	-	-	-	-

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumberdaya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara terintegrasi	Jumlah sumberdaya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintergrasi	25 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tingkat daerah	72%	-	2%	0%	0%	-	-	-
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	85%	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	1500 orang	-	83%	73,21%	88,20%	84%	57,28%	71,60%
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja	400 orang	-	86%	57,79%	67,20%	87%	0%	0%
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	150 Orang	-	500 orang	60 orang	12%	50 orang	0 orang	0%
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layan AKAD dan AKL	20 orang	-	-	-	-	60 orang	0 orang	0%
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaptkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	500 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	5%	-	20 orang	50 orang	250%	40 orang	0 orang	0%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	15 Lembaga	-	800 orang	401 orang	50,21%	-	-	-
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPTKS yang memiliki perizinan	15 Lembaga	-	6%	0%	0%	-	-	-
2	07	04	2.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang terintergrasi	70%	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendaliansesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online	1.000 orang	-	80%	58,60%	73,25%	85%	0%	0%
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	1.250 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencaridan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui jumlah sistem online (karir hub)	70%	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	50 Orang	-	2.700 orang	2.432 orang	90,07%	250 orang	0 orang	0%
2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi	20 orang	-	75%	0%	0%	85%	0%	0%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	07	04	2.04	0001	PeningkatanPerlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI /PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	40 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	80%	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purnayang diberdayakan	15%	-	-	-	-	20 orang	0 orang	0%
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	35 perusahaan	-	90%	100%	111,11%	90%	100%	111,11%
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%	35 perusahaan	-	100 perusahaan	177 perusahaan	177%	100 perusahaan	23 perusahaan	23%
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan HI dan terdaftar di WLKP online	30 laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjaserta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (Pendataan sarana HI)	4%	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (Pembinaan Kepesertaan BPJS)	50 perkara	-	-	-	-	-	-	-
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Angka Sengketa per Tahun	20 perkara	-	0,45%	0,45%	22,5%	2%	0,45%	22,5%
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	40 asosiasi dan SP	-	2 perkara	1 Perkara	50%	5 perkara	1 perkara	20%
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan (Penyelesaian Perselisihan HI)	30 lembaga	-	-	-	-	4 perkara	1 perkara	0,25%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
2	*07*	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan RekapitulasiK eanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serika tBuruhserta non afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (Pembinaan Hi dan Norma Kerja)	80 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	*07*	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina		-	30 lembaga	1 Lembaga	3,33%	1 lembaga	1 lembaga	100%
2	*07*	05	2.02	0005	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Jumlah program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		-	800 orang	15.568 orang	194,6%	23.231 orang	3.950 orang	17%
3					Urusan Pemerintahan Pilihan		30%							
3	32				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi		30%							
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	3 laporan	-	40%	6,67%	16,68%	50%	0%	0%
3	32	03	03		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	10 KK	-	40%	6,67%	16,68%	50%	0%	0%
3	32	03	03	0001	Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi yang berasaldari 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	50 orang	-	-	-	-	-	-	0%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (TW I 2025)	Tingkat capaian realisasi (%)
3	32	03	03	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasaldari 1 (satu) daerahKabupaten / Kota	Jumlah Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	4 KK	-	3 KK	1 KK	33,33%	2 KK	0 KK	0%
3	32	03	03	0005	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan	4 lokasi	-	-	-	-	-	-	0%
3	32	03	2.01	0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan diri di satuan pemukiman transmigrasi	10 KK	-	-	-	-	-	-	0%
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	10 KK	-	4 lokasi	1 lokasi	25%	1 lokasi	0 lokasi	0%
3	32	03	2.01	0012	Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan pelatihan	10 paket	-	-	-	-	-	-	0%
3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/kota sampai ke lokasi	3 lokasi	-	10 KK	1 KK	10%	-	-	0%
3	32	03	2.01	0019	Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku)	Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigran		-	-	-	-	2 paket	-	0%
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi		-	4 lokasi	1 lokasi	25%	1 lokasi	0 lokasi	0%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian RPJPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJPD Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.1

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0%	Sangat rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Belum ada faktor penyebab terhambatnya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Capaian masih 0% hal ini dikarenakan dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai masih tribulan III tahun 2025	Sudah berupaya maksimal memenuhi permintaan data yang dibutuhkan SAKIP
Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	28,57%	Sangat Rendah

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Saat ini belum ada hambatan untuk capaian kinerja indikator ini	Pelatihan masih dalam proses pelaksanaan dan masih cukup banyak masyarakat yang belum membuka usaha mandiri	Melakukan pendampingan dengan mengelompokkan peserta berdasarkan usaha yang ditekuni untuk memudahkan monitoring dan pengembangan embrio usaha dan juga memberikan bantuan sarana usaha
Program Penempatan Tenaga Kerja	57,28%	Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Saat ini belum ada hambatan untuk capaian kinerja indikator ini	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 57,28% yang diperoleh dari jumlah pencari kerja yang terdaftar sejumlah 1.421 pencari kerja dan 814 diantaranya berhasil difasilitasi penempatannya pada perusahaan.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk terkait dengan kebutuhan karyawan pada Perusahaan sebagaimana rekomendasi Kepala Dinas.
Program Hubungan Industrial	100%	Sangat tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Perlu pemahaman antara Perusahaan dan Pekerja/Buruh terkait	Target yang ditentukan dalam Renstra sebesar 90% dan telah terealisasi sebesar 100%. Hal ini	Untuk tahun yang akan datang supaya

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	berarti telah mencapai target karena kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat sebanyak 1 perkara dan dapat diselesaikan diluar pengadilan.	menambah target capaian
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Belum ada kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada triwulan I karena belum adanya kuota pemberangkatan calon transmigrant dari Kementerian	Belum ada realisasi atau pelaksanaan pemberangkatan calon transmigrasi karena belum ada jadwal dan kuota pemberangkatan dari Kementerian	Segera melakukan koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan kuota calon transmigran

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sampai dengan tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Urusan Tenaga Kerja										
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,50%	68%	68,50%	69,79%	-	-	67,50%	68%	68,50%	Renstra tahun 2024-2026

Tabel 2.2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Urusan Tenaga Kerja										
1.	Pencari kerja yang ditempatkan	2.600 orang	2.650 orang	2.700 orang	4.749 orang	-	-	-	2.650 orang	2.700 orang	Renstra tahun 2024-2026
2.	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan perjanjian bersama	3 perkara	4 perkara	5 perkara	0 perkara	-	-	-	4 perkara	5 perkara	Renstra tahun 2024-2026
3.	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	1 KK	1 KK	1 KK	1 KK	-	-	-	1 KK	1 KK	Renstra tahun 2024-2026

Dari hasil survey angkatan kerja nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Nganjuk data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat disajikan tabel seperti berikut ini :

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022-Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2022-Ags 2023		Perubahan Ags 2023-Ags 2024	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	847,60	891,13	898,95	43,53	5,14	7,82	0,88
Angkatan Kerja	566,10	596,11	627,40	30,01	5,30	31,29	5,25
- Bekerja	539,24	568,20	603,10	28,96	5,37	34,90	6,14
- Pengangguran	26,85	27,91	24,30	1,06	3,95	-3,61	-12,93
Bukan Angkatan Kerja	281,51	295,01	271,55	13,50	4,80	-23,46	-7,95
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,74	4,68	3,87	-0,06		-0,81	
- Laki-laki	4,02	4,59	3,80	0,57		-0,79	
- Perempuan	5,92	4,84	3,97	-1,08		-0,87	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,79	66,89	69,79	0,10		2,90	
- Laki-laki	83,64	84,91	84,35	1,27		-0,56	
- Perempuan	50,31	48,86	55,22	-1,45		6,36	

2.2.1. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan tahap ke IV RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025, kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 3 tahun. Tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yaitu

1. Nganjuk Tumbuh;
2. Nganjuk Sehat dan Cerdas;
3. Nganjuk Akuntabel;
4. Nganjuk Harmonis.

Keterkaitan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk terletak pada Rumusan tujuan yang ke 1 yaitu **"Nganjuk Tumbuh"** dengan sasaran ke-5 yaitu **Meninngkatkan penyerapan tenaga kerja** dengan indikator sasaran **Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**.

2.2.2. Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2024 dilaksanakan secara elektronik dengan aplikasi e-SUKMA berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sehingga pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 89.80% dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik), juga menggunakan indikator penilaian kepuasan masyarakat yang mendasarkan 9 unsur yang diwajibkan dalam peraturan tersebut yang meliputi :

1. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun non teknis.
2. Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruhproses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara. Segala jenis pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk tidak dipungut biaya atau GRATIS.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak.
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun di Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.3

Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Persyaratan	100%
2.	Prosedur	100%
3.	Waktu Pelayanan	100%
4.	Biaya/Tarif	100%
5.	Produk Spesifikasi Jenis	100%
6.	Layanan	100%
7.	Kompetensi Pelaksana	100%
8.	Sarana Prasarana	100%
9.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	100%

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

2.2.3. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Tabel 2.2.4

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Kabupaten Nganjuk

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2023)	Target Pencapaian			Perangkat Daerah Pelaksana
					2024	2025	2026	
Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan								
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1.[b]	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Naker	persen	73,21	83	85	87	DISNAKER
Tujuan 8 :Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi								
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
Proxy	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Naker	persen	66,89	67,50	68	68,50	DISNAKER
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin							
Proxy	Persentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi kluster	Naker	persen	100	100	100	100	DISNAKER
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Bappeda, Naker	persen	4,68				
Proxy	Tingkat Pengangguran Terbuka	Naker	persen	4,68				

8.5.2.[a]	Persentase setengah pengangguran.	Naker						
Proxy	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Naker	persen	82,04	83	84	85	DISNAKER
Target 8.8 Melindungi hakhak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.								
8.8.1.(a)	Jumlah klaim manfaat jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan	Naker						Untuk JKK itu merupakan ranah Pengawas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan
Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan								
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.								
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Naker	persen	73,21	83	85	87	DISNAKER
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, terma-suk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.								
10.7.2.(c)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Naker	orang	657	350	400	400	DISNAKER
Proxy	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	Naker	persen	9,09	40	50	60	DISNAKER

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sektor ketenagakerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan, menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada

maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang kerap dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja adalah :

1. Belum sesuainya kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
2. Masih tingginya tingkat turn over di perusahaan karena rendahnya etos kerja
3. Masih adanya perusahaan yang belum menerapkan norma dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dapat merumuskan isu strategis dari permasalahan tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja
2. Peningkatan etos kerja melalui pembentukan karakter tenaga kerja yang produktif
3. Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Perusahaan

2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah **"Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Potensi Unggulan Daerah, Pembangunan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi".**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	4.697.796.950	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	4.697.796.950	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	16 dokumen	15.680.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	16 dokumen	15.680.000	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	15.680.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	15.680.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21 laporan	3.791.378.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21 laporan	3.791.378.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	3.787.233.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	3.787.233.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.145.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.145.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	3.330.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	3.330.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Disnaker	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	19 paket	3.330.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Disnaker	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	19 paket	3.330.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 dokumen	188.942.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 dokumen	188.942.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	27.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	27.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	31.369.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	31.369.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	11.848.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	11.848.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	6.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disnaker	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	4.725.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disnaker	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	4.725.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	135.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	135.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Disnaker	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	197 unit	465.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Disnaker	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	197 unit	465.000.000	
	Pengadaan Mebel	Disnaker	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 unit	140.000.000	Pengadaan Mebel	Disnaker	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 unit	140.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 unit	175.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 unit	175.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 laporan	470.820.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 laporan	470.820.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 dokumen	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 dokumen	2.500.000	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	81.500.000	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	81.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	386.820.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	386.820.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disnaker	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	24 unit	227.646.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disnaker	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	24 unit	227.646.000	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	55.146.000	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	55.146.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	225.924.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	225.924.000	
	Pemeliharaan Mebel	Disnaker	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	25.000.000	Pemeliharaan Mebel	Disnaker	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	25.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	15.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	150.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	150.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	7.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	7.500.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker				
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Disnaker	Prosentase akurasi, proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	100%	100.000.000	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Disnaker	Prosentase akurasi, proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	100%	100.000.000	
	Penyusunan Rencana Kerja (RTK)	Disnaker	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Kerja (RTK)	Disnaker	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja	1 dokumen	100.000.000	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Disnaker	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK) yang disusun	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Disnaker	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK) yang disusun	1 dokumen	100.000.000	
	Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker	Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster	100%	875.000.000	Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker	Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster	100%	875.000.000	
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Disnaker	Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi	71%	815.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Disnaker	Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi	71%	815.000.000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	220 orang	665.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	220 orang	665.000.000	
	Pengadaan sarana pelatihan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	30 paket	150.000.000	Pengadaan sarana pelatihan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	30 paket	150.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Persentase LPK swasta yang dibina	80%	10.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Persentase LPK swasta yang dibina	80%	10.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	27 lembaga	10.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	27 lembaga	10.000.000	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tingkat daerah	1%	50.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tingkat daerah	1%	50.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Disnaker	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	5 dokumen	50.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Disnaker	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	5 dokumen	50.000.000	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	83%	1.000.000.000	Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	83%	1.000.000.000	
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja	86%	925.000.000	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja	86%	925.000.000	
	Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layan AKAD dan AKL	200 orang	600.000.000	Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layan AKAD dan AKL	200 orang	600.000.000	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang mendaptkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	50 orang	100.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang mendaptkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	50 orang	100.000.000	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker	Jumlah Pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui jumlah sistem online (karir hub)	300 orang	25.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker	Jumlah Pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui jumlah sistem online (karir hub)	300 orang	25.000.000	
	Job Fair/Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	1.500 orang	200.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	1.500 orang	200.000.000	
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penemp atan) di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi	4%	75.000.000	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penemp atan) di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi	4%	75.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Disnaker	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	20 orang	75.000.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Disnaker	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	20 orang	75.000.000	
	Program Hubungan Industrial	Disnaker	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90%	800.000.000	Program Hubungan Industrial	Disnaker	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90%	800.000.000	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanajian Kerja Bersama untu yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%	107 perusahaan	50.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanajian Kerja Bersama untu yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%	107 perusahaan	50.000.000	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial teaga Kerja Pengupahan	Disnaker	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	1 laporan	50.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial teaga Kerja Pengupahan	Disnaker	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	1 laporan	50.000.000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Presentase Angka Sengketa per Tahun	1%	750.000.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Presentase Angka Sengketa per Tahun	1%	750.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	300.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	300.000.000	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan (Penyelesaian Perselisihan HI)	5 perkara	100.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan (Penyelesaian Perselisihan HI)	5 perkara	100.000.000	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan RekapitulasiK eanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serika t Buruh serta non afiliasi	Disnaker	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (Pembinaan Hi dan Norma Kerja)	16 asosiasi dan SP	50.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan RekapitulasiK eanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serika t Buruh serta non afiliasi	Disnaker	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (Pembinaan Hi dan Norma Kerja)	16 asosiasi dan SP	50.000.000	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	150.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	150.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Disnaker	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	90 orang	150.000.000	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Disnaker	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	90 orang	150.000.000	
	Urusan Pemerintahan Pilihan	Disnaker				Urusan Pemerintahan Pilihan	Disnaker				
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Disnaker			225.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Disnaker			225.000.000	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Disnaker	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	100%	225.000.000	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Disnaker	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	100%	225.000.000	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	20%	225.000.000	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	20%	225.000.000	
	Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi yang berasaldari 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Disnaker	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 laporan	50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi yang berasaldari 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Disnaker	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 laporan	50.000.000	
	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran	Disnaker	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	1 dokumen	50.000.000	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran	Disnaker	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	1 dokumen	50.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasaldari 1 (satu) daerahKabupaten / Kota	Disnaker	Jumlah Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	3 KK	75.000.000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasaldari 1 (satu) daerahKabupaten / Kota	Disnaker	Jumlah Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	3 KK	75.000.000	
	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Disnaker	Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan	50 orang	50.000.000	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Disnaker	Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan	50 orang	50.000.000	
	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Disnaker	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan diri di satuan pemukiman transmigrasi	6 KK	45.000.000	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Disnaker	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan diri di satuan pemukiman transmigrasi	6 KK	45.000.000	
	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Disnaker	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	6 lokasi	75.000.000	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Disnaker	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	6 lokasi	75.000.000	
	Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran	Disnaker	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan pelatihan	15 KK	56.000.000	Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran	Disnaker	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan pelatihan	15 KK	56.000.000	
	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Disnaker	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/kota sampai ke lokasi	15 KK	125.000.000	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Disnaker	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/kota sampai ke lokasi	15 KK	125.000.000	
	Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku)	Disnaker	Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigran	15 paket	100.000.000	Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku)	Disnaker	Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigran	15 paket	100.000.000	
	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Disnaker	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	6 lokasi	100.000.000	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Disnaker	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	6 lokasi	100.000.000	

Sumber : Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk. Sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu menggunakan pendekatan atas-bawah (*top-down*) yaitu perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (*top-down*) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Disinilah semua data dari para pemangku kepentingan berawal dan berakhir. Usulan dari semua pemangku kepentingan disusun sebagai bahan untuk didiskusikan, ditelaah secara kritis oleh semua pemangku kepentingan pengusul, dan konfirmasi kembali sebelum diproses menjadi Perubahan Rencana Kerja (RENJA). Telaahan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan selajutnya disajikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster		
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Ds. Sempu Kec. Sawahan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	2 paket	Pelaksanaan kegiatan pelatihan servis sepeda motor
2	Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi		

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kec. Ngronggot	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	1 paket	Pelaksanaan kegiatan pelatihan barbershop

Sumber : SIPD Perubahan Renja Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 mengangkat tema **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah "*Meningkatnya penyerapan angkatan kerja*", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "*Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja*" dan "*Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis*", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,90%
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	75%
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

3.3 Program dan Kegiatan

RKPD merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA KAB. NGANJUK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA							**7.327.849.029,00**	**7.560.032.447,00**	**9.798.582.886,00**	**2.270.533.859,00**							**9.897.937.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.496.549.029,00**	**7.469.003.447,00**	**9.770.382.886,00**	**2.274.033.859,00**							**9.680.937.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**7.496.549.029,00**	**7.469.003.447,00**	**9.770.382.886,00**	**2.274.033.859,00**							**9.680.937.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja**				**81 Nilai**	**76 Nilai**	**4.773.035.029,00**	**4.611.395.697,00**	**4.711.538.236,00**	**1.720.501.971,00**							**9.493.537.000,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun*				26 laporan	26 laporan	22.958.000,00	22.958.000,00	15.732.000,00	-7.226.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Tenaga Kerja		21.680.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	20 Laporan	15.450.000,00	15.450.000,00	8.224.000,00	-7.226.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			15.680.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	7.508.000,00	7.508.000,00	7.508.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*				4 dokumen	4 dokumen	2.727.006.501,00	2.769.294.619,00	2.840.001.000,00	112.994.499,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Tenaga Kerja		3.651.485.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.722.675.501,00	2.765.166.619,00	2.840.001.000,00	117.122.499,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			3.647.333.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	0 Laporan	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	-4.125.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			4.152.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 dokumen	1 dokumen	80.800.000,00	0,00	0,00	-80.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Tenaga Kerja		70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	0 Unit	80.800.000,00	0,00	0,00	-80.800.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah* *Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah*				32 dokumen	32 dokumen 4 undefined	637.896.228,00	488.437.778,00	281.050.038,00	-356.846.190,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Tenaga Kerja		429.525.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	753.000,00	753.000,00	753.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			27.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	87.403.078,00	79.680.978,00	63.738.878,00	-23.664.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			65.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.630.160,00	12.474.800,00	9.219.180,00	-8.310.980,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			25.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahas Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			20.126.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	507.509.000,00	351.029.000,00	184.339.000,00	-323.170.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			255.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan*				162 unit	162 unit	465.100.300,00	496.566.800,00	496.588.800,00	31.488.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Tenaga Kerja		181.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				36 Unit	36 Unit	70.829.300,00	38.382.300,00	38.382.300,00	-32.447.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	380.965.350,00	444.878.850,00	444.878.850,00	63.913.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			96.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				98 Unit	98 Unit	13.305.650,00	13.305.650,00	13.305.650,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				36 laporan	36 laporan	481.340.000,00	481.130.000,00	481.130.000,00	-210.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Tenaga Kerja		552.780.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.600.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	-210.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			98.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	448.740.000,00	448.740.000,00	448.740.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			444.780.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpelihara*				63 unit	63 unit	376.135.000,00	373.009.900,00	597.088.400,00	218.923.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Tenaga Kerja		1.567.067.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	48.650.000,00	48.650.000,00	48.650.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			76.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	94.735.000,00	94.508.500,00	118.528.400,00	23.893.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			228.067.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	10.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	209.700.000,00	209.700.000,00	409.630.000,00	199.930.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	17 Unit	11.900.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-4.900.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			1.125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Presentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster**				**100 %**	**100 %**	**752.172.950,00**	**530.472.950,00**	**2.378.928.650,00**	**745.327.050,00**							**1.497.400.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Prosentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi*				72 %	72 %	842.375.950,00	420.875.980,00	2.273.931.860,00	1.831.555.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masyarakat Kabupaten Nganjuk		1.372.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				320 Orang	570 Orang	842.375.950,00	420.875.980,00	2.273.931.860,00	1.831.555.700,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			1.372.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Prosentase LPK swasta yang dibina*				82 %	82 %	79.850.000,00	79.850.000,00	75.050.000,00	-4.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		95.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				48 Lembaga	45 Lembaga	79.850.000,00	79.850.000,00	75.050.000,00	-4.800.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			95.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Persentase Perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas*				11 %	11 %	29.947.000,00	29.947.000,00	29.947.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Perusahaan Kecil		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				15 Perusahaan	15 Perusahaan	29.947.000,00	29.947.000,00	29.947.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**				**84 %**	**84 %**	**1.450.684.800,00**	**1.001.100.800,00**	**688.385.800,00**	**-650.684.800,00**							**600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapat fasilitasi pelayanan antar kerja*				87 %	87 %	1.117.691.800,00	725.667.800,00	397.852.800,00	-719.839.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masyarakat Kabupaten Nganjuk		450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				50 Orang	50 Orang	99.975.000,00	149.975.000,00	45.975.000,00	-54.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				120 Orang	60 Orang	884.248.000,00	442.124.000,00	286.918.000,00	-597.330.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				40 Orang	40 Orang	133.468.800,00	133.468.800,00	64.961.800,00	-65.507.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online*				85 %	85 %	181.125.000,00	181.125.000,00	179.125.000,00	-2.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masyarakat Kabupaten Nganjuk		245.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				250 Orang	1000 Orang	181.125.000,00	181.125.000,00	179.125.000,00	-2.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			245.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi*				85 %	85 %	151.868.000,00	94.408.000,00	81.408.000,00	-70.460.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masyarakat Kabupaten Nganjuk		105.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				40 Orang	20 Orang	151.868.000,00	94.408.000,00	81.408.000,00	-70.460.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			105.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**				**90 %**	**90 %**	**520.456.250,00**	**1.326.033.000,00**	**2.021.539.300,00**	**260.543.750,00**							**790.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%*				80 perusahaan	80 perusahaan	20.666.200,00	21.108.200,00	19.130.000,00	-1.536.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kabupaten Nganjuk		110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perguruhan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Perguruhan				1 Laporan	1 Laporan	20.666.200,00	21.108.200,00	19.130.000,00	-1.536.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Angka Sengketa Perusahaan per Tahun*				2,3 %	2,3 %	499.790.050,00	1.304.926.800,00	2.002.400.200,00	1.502.610.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kabupaten Nganjuk		880.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				5 Perkara	5 Perkara	314.083.900,00	359.096.600,00	203.571.600,00	-108.512.300,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			115.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				4 Perkara	4 Perkara	73.626.500,00	30.723.000,00	30.723.000,00	-42.903.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			115.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.09.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	55.766.050,00	80.209.000,00	80.209.000,00	24.442.950,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.08.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				14800 Orang	15700 Orang	56.313.600,00	834.888.200,00	1.885.888.800,00	1.829.583.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**31.500.000,00**	**31.500.000,00**	**28.000.000,00**	**-3.500.000,00**							**317.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**31.500.000,00**	**31.500.000,00**	**28.000.000,00**	**-3.500.000,00**							**317.000.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**				**50 %**	**50 %**	**31.500.000,00**	**31.500.000,00**	**28.000.000,00**	**285.500.000,00**							**317.000.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase calon transmigran yang diberangkatkan*				50 %	50 %	31.500.000,00	31.500.000,00	28.000.000,00	-3.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masyarakat Kabupaten Nganjuk		317.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				2 Kepala Keluarga	2 Kepala Keluarga	8.000.000,00	8.000.000,00	28.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			42.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran																		
			Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan				1 Lokasi	0 Lokasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0019	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)																		
			Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran				2 Paket	0 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				1 Lokasi	0 Lokasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Ngarjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P4 Kab : Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	J U M L A H								**7.527.649.029,00**	**7.500.502.447,00**	**9.798.382.688,00**	**2.270.533.659,00**							**9.897.937.000,00**	

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam Bidang Tenaga Kerja.

Tabel 3.3

Program Prioritas Pembangunan Alokasi Anggaran Tahun 2025

kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	
			Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
2.07.02	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster	100%	2.378.928.650
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	85%	658.385.800
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90%	2.021.530.200

Tabel 3.4

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
					DINAS TENAGA KERJA			9.798.382.888
2	07				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			9.770.382.888
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 nilai	4.711.538.238
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	26 dokumen	15.732.000
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	8.224.000
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	7.508.000
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 laporan	2.840.001.000
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	2.840.001.000
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	0

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-
2	07	01	2.05	0002	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	28 dokumen	281.050.038
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	753.000
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	63.668.878
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	9.219.160
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	3.000.000
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	6.000.000
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	184.339.000
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen	14.000.000
2	07	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	198 unit	496.566.800
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	150 unit	38.382.300
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 unit	444.878.850

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07	01	2.07	0010	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	13.305.650
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	481.130.000
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2.390.000
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	30.000.000
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	448.740.000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	28 unit	597.058.400
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	48.650.000
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	118.628.400
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	3.000.000

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	10.150.000
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	409.630.000
2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	7.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster	100%	2.378.928.650
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Prosentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi	72%	2.273.931.650
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	510 orang	2.273.931.650
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga pelatihan yang terakreditasi	3 lembaga	75.050.000

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	45 lembaga	75.050.000
2	07	03	2.04		Konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil	Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktifitas	11%	29.947.000
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktifitas	15 perusahaan	29.947.000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	84%	658.385.800
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang mendapat pemagangan kerja	87%	397.852.800
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan sumberdaya pelayanan antar kerja	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dll untuk meningkatkan kompetensi	50 orang	45.975.000
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	60 orang	286.916.000
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	40 orang	64.961.800
2	07	04	2.03		Pengelolaan informasi pasar kerja	Persentase cakupan penyebarluasan informasi pasar kerja	85%	179.125.000

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07	04	2.03	0003	Job fair/bursa kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui jobfair/bursa kerja	1.000 orang	179.125.000
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi	85%	81.408.000
				0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	20 orang	81.408.000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90%	2.021.530.200
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanajian Kerja Bersama untu yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki LKS Bipartit aktif	21 perusahaan	19.130.000
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial teaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	1 laporan	19.130.000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angka Sengketa Perusahaan per Tahun	2,3%	2.002.400.200
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak	Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	205.571.600

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
					pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan (Penyelesaian Perselisihan HI)	4 perkara	30.723.000
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	80.209.000
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	15.700 orang	1.685.896.600
					Urusan Pemerintahan Pilihan			
3	32				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			28.000.000
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	50%	28.000.000
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	50%	28.000.000
3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon lokasi penempatan transmigran yang dilaksanakan penjajakan	2KK	28.000.000
3	32	03	2.01	0009	Penjajagan ke calon lokasi penempatan calon transmigran	Jumlah calon lokasi penempatan transmigran yang dilaksanakan penjajagan	4 lokasi	0

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
3	32	03	2.01	0019	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigran	2 paket	0
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	1 lokasi	0
JUMLAH							**9.798.382.888**	

Tabel 3.5

Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
		N I H I L				

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPD dan Renstra Dinas Tenaga Kerja yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja; dan
   c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001